

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, yaitu suatu bentuk kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal tersebut dapat dikatakan kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi berada di tangan rakyat, rakyat memiliki hak, kewajiban, kesempatan, bebas berbicara, bebas mengungkapkan pendapat serta bebas berekspresi dan bebas berkarya tanpa harus di batasi ataupun dihalangi dan berhak mengemukakan pendapat dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang berlaku dalam Negara. Indonesia adalah suatu negara yang cukup besar jumlah penduduk dan keanekaragaman suku, bangsa, dan agama .Sebagai Negara demokrasi.

Untuk itu sistem demokrasi tidak lepas dari sistem politik maka dari itu sistem politiksaat ini terus mengalami perkembangan dalam tatanan perpolitikannya. Seseorang dapat mengalami dampak dari berbagai bentuk dan tahapan proses politik. Sekalipun begitu, pengaruh politik terhadap setiap orang tidaklah sama.

Setiap warga negara harus memiliki kesadaran politik dan mampu memahami dunia politik dengan baik. Perilaku politik masyarakat dalam setiap kegiatan- kegiatan politik yang dilakukan sangat penting untuk mendukung proses kerja pemerintah dan pelaksanaan fungsi-fungsi birokrasi didalam menjalankan pemerintahan. Hal ini karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan

oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik (Ramlan Surbakti:1992).

Semenjak demokrasi menjadi atribut utama negara modern, maka perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan kehendak rakyat (*will of the people*). Otoritas sebuah pemerintahan, akan bergantung kepada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak rakyat (*will of the people*) ini sebagai nilai yang tertinggi di atas kehendak negara (*will of the state*). Atas dasar prinsip-prinsip normatif yang demikian itu, dalam praktek kehidupan demokrasi, yang awal, lembaga legislatif yang memiliki posisi yang sangat strategis dan sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin tentang Kedaulatan rakyat serta kedaulatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini didasarkan kepada suatu pandangan bahwa hanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saja yang mewakili rakyat dan yang memiliki kompetensi untuk mengungkapkan kehendak rakyat (*will of the people*) dalam bentuk Undang-Undang (UU) (Sitepu,2012:173).

Salah satu cara dalam menentukan siapa yang berhak menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah dengan dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan di sebagian besar negara termasuk di Indonesia, yang *notabene* merupakan masyarakat heterogen. Melalui pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan dicita-citakan sehingga terwujud

kehidupan yang lebih baik.

Maka calon legeslatif dapat dipilih dalam pemilihan umum hanya melalui jalu partaipolitik. Sebagaimna Partai politik adalah salah satunya, sebagai komponen yang penting di dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Dengan adanya suatu partai politik suatu warga Negara lebih mudah untuk ikut dalam kehidupan negara demi suatu kesejahteraan rakyat, Hal ini sesuai dengan rumusan Undang-undang No.2 Tahun 2008 Pasal 10 Bab Vdi katakan bahwa “Tujuan umum partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui pemilihan secara langsung maka masyarakat bersikap aktif dalam pelaksanaan partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi–pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan–keputusan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan partisipasi politik masyarakat memerlukan adanya sarana politik yaitu partai politik. Sebagaimna Pemilihan umum yang selanjutnya di sebut pemilihan umum adalah sarana kedaultan rakyat memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945.(UU NO.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 1 Ayat 1).

Indonesia adalah Negara demokrasi yang sudah pasti terdapat banyak partai politik yang berkembang terutama dalam suasana pemilihan umum di tahun 2019 ini, partai politik pada dasarnya adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat karena melalui partai politik maupun organisasi dapat menjadi sarana/alat bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan kehendaknya. Oleh karena itu partai politik memiliki peranan yang penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partai politik merupakan komponen yang penting dalam sistem politik demokrasi, dengan demikian penataan kepartaian harus dapat bertumpu pada kaedah-kaedah kedaulatan rakyat, yaitu memberi kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan . Tujuan kelompok yang ada dalam partai politik yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara apapun untuk melaksanakan kebijakan- kebijakan yang diinginkan dalam kelompok tersebut. Di Indonesia peranan partai politik ini sangat penting sebab Negara Indonesia memiliki keanekaragaman suku, agama, ras dan budaya dalam keanekaragaman tersebut tentu terdapat berbagai macam kebijakan yang diinginkan masyarakat demi mencapai kesejahteraan bangsa dan Negara hal tersebut memerlukan wadah yaitu untuk menyampaikan aspirasinya sebagai warga Negara.

Peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan internasional. Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berkembang. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik .

Namun melihat Kondisi nyata Parpol yang terjadi masalah bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan semata. Para pejabat yang memiliki kekuasaan telah melupakan masyarakat, Janji-janji yang dulu di buat justru di lupakan seiring dengan kursi kekuasaan yang diperoleh, Partai politik pun juga masih belum menunjukkan kinerja dengan baik dan tanggungjawabannya pada masyarakat. mesin-mesin Parpol yang seharusnya berfungsi sebagai alat kontrol kader yang duduk di parlemen sebagai pembawa aspirasi, justru tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak disalurkan aspirasi rakyat, tak dipenuhinya janji yang ditebar saat kampanye dan banyaknya korupsi . Akhirnya dengan hal itu rakyat yang menjadi korban dari kondisi yang ada sekarang dan menjadikan turunnya rasa kepercayaan masyarakat pada partai politik akibat hal-hal yang terjadi.

Di karenakan bahwa masyarakat beranggapan bahwa partai politik merupakan alat mobilisasi figure agar bisa mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Kemudian alasan selanjutnya bahwa ada calon legislative yang mencalonkan diri itu awalnya calon itu berada di partainya ketika mencalonkan diri calon itu berganti partai di mana penilaian masyarakat kader partai politik itu sendiri tidak konsisten terhadap partai politiknya dan yang kedua bahwa sekarang masyarakat menilai bahwa partai politik tidak lagi bekerja dengan sesuai mekanisme yang ada di mana sekarang partai politik hanya melakukan bagaimna agar partai mereka biasa berkuasa dalam parlemen dan sudah tidak lagi melakukan peran dan fungsi utama partai politik. Sehingga dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana perilaku masyarakat pada partai politik dan identifikasi masyarakat pada partai politik yang akan berpengaruh dalam mnentukan pilihan.

Seperti yang telah dilaksanakan bersama, pada tahun pemilu 2019 yang lalu merupakan pesta demokrasi lima tahunan yaitu pemilihan anggota legislatif. Masyarakat Kabupaten Pohuwatoyang dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 103.058 jiwa melakukan proses pemilihan Umum tahun 2019. Kemudian perbandingan suara yang melakukan partisipasi dalam pemilihan umum Legislatif hanya 86.05% di badingkan dengan partisipasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 86.39%.

Berdasarkan latar belakang di atas untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perilaku Masyarakat Pada Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif DPRD Kabupaten Pohuwato Tahun 2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Ada beberapa masalah yang ingin ditelusuri lebih dalam oleh peneliti.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku masyarakat terhadap partai politik dalam pemilihan anggota legislatif DPRD Kabupaten Pohnuawato ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat pada partai politik dalam pemilihan umum DPRD Kabupaten Pohnuawato ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perilaku masyarakat terhadap partai politik dalam pemilihan anggota legislatif DPRD Kabupaten Pohnuawato.
2. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih pada masyarakat dalam pemilihan umum DPRD Kabupaten Pohnuawato.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas maka terdapat manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan membantu seseorang untuk menambah ilmu pengetahuan tentang perilaku politik .
2. Sebagai pengalaman proses belajar dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan penelitian sebagai peneliti pemula.
3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi penelitian lebih lanjut yang tertarik mengkaji fenomena serupa.